

Social License as a Corporate Sustainability Strategy PT Pupuk Kalimantan Timur (Case Study of The Tanjung Limau Floating Craft CSR Program)

Budi Wahyu Soesilo^{*}, Bambang Rudito²

¹MBA School of Business Management, Institut Teknologi Bandung

²School of Business Management, Institut Teknologi Bandung

*Email Korespondensi: budi_wahju@sbm-itb.ac.id

Abstract

Social License is a form of acceptance and support given by the community to the company's operations, as part of the social attitude of the community, the results of social legitimacy are dynamic and can change according to the relationship between the company and the community. This study aims to determine the level of social legitimacy of the company's operations by the community in the form of the value of social license (Social License Index). This research was conducted in the Ring 1 and Ring 2 areas of the company, namely Bontang Baru Village which is the company's Ring 1 area, Bontang Kuala Village and Gusung Island Meru, North Bontang District, Bontang City, East Kalimantan Province during the period January to July 2020. This study uses mixed methods. Measurement of the value of Social License Index (SLI) using a quantitative method with 30 respondents from the community and processed using Microsoft Excel software, then to determine the quality and narrative of social legitimacy used a qualitative descriptive method by conducting in-depth interviews with 10 informants who are considered to know the conditions program. The results of the study indicate that the social legitimacy given by the community to the company's operations shows a value of 3,95 or is included in the High Approval category. This category shows that the community has accepted and trusted the company's operations in people's daily lives. This is supported by evidence of the success of the Tanjung Limau Floating Cage (KJA) CSR program implemented in the company's Ring 1 area, which has shown a positive impact on the company and the community.

Keywords: *Social License; CSR; Sustainability*

Lisensi Sosial sebagai Strategi Keberlanjutan PT Pupuk Kalimantan Timur (Studi Kasus Program CSR Keramba Jaring Apung Tanjung Limau)

Abstrak

Lisensi Sosial merupakan suatu bentuk penerimaan dan dukungan yang diberikan masyarakat terhadap operasional perusahaan, sebagai bagian dari sikap sosial masyarakat, hasil legitimasi sosial bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat legitimasi sosial operasional perusahaan oleh masyarakat berupa nilai izin sosial (Social License Index). Penelitian ini dilakukan di wilayah Ring 1 dan Ring 2 perusahaan yaitu Desa Bontang Baru yang merupakan wilayah Ring 1 perusahaan, Desa Bontang Kuala dan Pulau Gusung Meru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur selama periode Januari sampai Juli 2020. Penelitian ini menggunakan metode campuran. Pengukuran nilai *Social License Index* (SLI) menggunakan metode kuantitatif dengan 30 responden dari masyarakat dan diolah menggunakan software Microsoft Excel, kemudian untuk mengetahui kualitas dan narasi legitimasi sosial digunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan 10 informan yang dianggap mengetahui kondisi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi sosial yang diberikan masyarakat terhadap operasional perusahaan menunjukkan nilai sebesar 3,95 atau termasuk dalam kategori High Approval. Kategori ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menerima dan mempercayai operasional perusahaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini didukung dengan bukti keberhasilan program CSR Keramba Terapung Tanjung Limau (KJA) yang dilaksanakan di area Ring 1 perusahaan telah menunjukkan dampak positif bagi perusahaan dan masyarakat.

Kata Kunci: Lisensi; Sosial; CSR; Keberlanjutan

Pendahuluan

Keberlanjutan perusahaan saat ini menjadi pembahasan penting bagi seluruh pelaku usaha guna memastikan kelangsungan usaha sejalan dengan prinsip-prinsip sosial dan lingkungan yang menjadi fokus masyarakat internasional. Supriyadi (2013) menjelaskan keberlanjutan perusahaan didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menciptakan keuntungan, melindungi lingkungan dan meningkatkan kehidupan sosial. Ketiga hal tersebut, menurut Aras & Crowther (2008) hanya dapat terjadi jika perusahaan mengenali isu-isu lingkungan dan sosial dan memasukkannya ke dalam perencanaan strategis perusahaan. Pembahasan tentang *corporate sustainability* tidak hanya sebatas pada aspek peningkatan skala ekonomi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, tetapi telah berkembang menjadi bahasan yang lebih inklusif dengan memasukkan unsur sosial dan lingkungan ke dalam topik pembahasan.

Pembahasan tentang *corporate sustainability* di Indonesia telah banyak dibahas dan menghasilkan berbagai regulasi yang mengatur bagaimana perusahaan mampu menjaga aspek operasional yang efisien namun tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan inklusi sosial. Meski begitu, masih banyak perusahaan di Indonesia yang gagal menerapkan strategi *corporate sustainability* dan berujung pada demonstrasi, konflik sosial, blokade bahkan penutupan perusahaan. Artinya kendala eksternal yang meliputi izin sosial dari masyarakat sebenarnya merupakan masalah yang lebih besar daripada masalah teknis lainnya dalam operasional perusahaan. Kegagalan dalam mengelola izin sosial juga mengakibatkan kerugian lain dalam pelaksanaan operasi industri, terutama faktor ekonomi yang diharapkan dari kehadiran industri/proyek (Dale, Chapman, & McDonald, 1997; Darea, Schirmerb, & Frank, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dan penerimaan masyarakat yang diberikan kepada perusahaan merupakan faktor penting dalam menjamin keberlangsungan perusahaan. Untuk itu, studi tentang lisensi sosial dan bagaimana strategi untuk mendapatkan lisensi sosial terus berkembang dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak Boutilier dan Thomson (2011) mempopulerkan penggunaan istilah *Social License to Operate* (SLO).

Salah satu upaya untuk menciptakan lisensi sosial adalah melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan yang partisipatif dan kolaboratif (Darea, Schirmerb, & Frank, 2014; Harvey & Bice, 2014). Adanya program tanggung jawab sosial perusahaan dinilai dapat menjadi salah satu strategi yang dapat menjadi solusi untuk mendapatkan legitimasi sosial di masyarakat mengingat dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial, perusahaan tidak hanya mementingkan aspek bisnis tetapi juga memiliki membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan *community development*.

Sejak saat itu, diskusi tentang aspek keberlanjutan perusahaan merambah ke banyak sektor industri, termasuk salah satunya untuk perusahaan pengolahan pupuk yang berlokasi di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Strategi keberlanjutan yang dilakukan oleh PKT mengutamakan pendekatan pengembangan masyarakat dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat mendukung keberlangsungan perusahaan (PKT, 2019). Namun, apakah pelaksanaan program tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh PKT sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam Program Keramba Jaring Apung (KJA) di Desa Bontang Baru telah mampu menciptakan izin sosial bagi operasional PKT? Hal ini

tidak diketahui mengingat sampai saat ini belum pernah ada studi penerimaan sosial masyarakat terhadap operasi PKT selain studi yang memenuhi kewajiban regulasi seperti studi *Social Impact Assessment* (SIA) yang memang menjadi syarat administratif dalam memperoleh izin legal dari Pemerintah. Tujuan penelitian ini diharapkan mampu menjawab kekosongan kajian sehingga dapat memberikan gambaran tentang izin sosial atau penerimaan sosial yang diberikan oleh masyarakat khususnya yang ada di Desa Bontang Baru, Desa Bontang Kuala dan Pulau Gusung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang terhadap perusahaan PKT.

CSR dan Lisensi Sosial

Corporate Social Responsibility (CSR) atau dalam istilah Indonesia sering disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam pembahasan tentang keberlanjutan perusahaan. Implementasi CSR seringkali dipandang sebagai cara bagi perusahaan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam operasinya (UNIDO, 2020). Kajian CSR juga telah berkembang menjadi paradigma dalam mengelola filantropi perusahaan guna memberikan manfaat yang lebih besar tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi perusahaan sebagai instrumen pemasaran, strategi bisnis untuk mengubah sistem operasi perusahaan menjadi lebih transformatif (Visser, 2014). Hal ini sejalan dengan pendapat Epstein dan Roy dalam Elving, dkk (2015) yang juga menyatakan bahwa implementasi CSR tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Ada banyak literatur yang membahas tentang konsep CSR, tetapi tidak ada definisi tunggal yang digunakan untuk istilah tersebut. Dahlsrud (2006) mengemukakan bahwa setidaknya ada lima dimensi konseptual dalam CSR, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, pemangku kepentingan, dan sifat sukarela yang sering digunakan dalam definisi CSR. Menurut Putri (2008), pelaksanaan CSR memberikan manfaat bagi perusahaan berupa: (1) Mempertahankan dan meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, (2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, (3) Mengurangi risiko bisnis perusahaan, (4) Memperluas akses sumber daya untuk operasi bisnis, (5) Membuka peluang pasar yang lebih luas, (6) Mengurangi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, (7) Meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, (8) Meningkatkan hubungan dengan regulator, (9) Meningkatkan moral dan produktivitas karyawan, dan (10) Peluang mendapatkan imbalan.

Lisensi sosial merupakan bentuk penerimaan masyarakat terhadap operasional perusahaan di wilayahnya. Meskipun sampai saat ini definisi izin sosial masih sulit didefinisikan secara baku mengingat bentuk izin sosial merupakan hal yang tidak berwujud dan tidak tertulis (Franks, 2013). Konsep perizinan sosial sendiri berkembang pada tahun 1990-an ketika Boutilier dan Thomson mengembangkan konsep penerimaan publik terhadap aktivitas perusahaan dalam tiga indikator, yaitu legitimasi, kredibilitas dan kepercayaan (Thomson & Boutilier, 2011; Boutilier R., 2017). Boutilier dan Thomson (2011) mengemukakan perusahaan perlu mengembangkan dan menjaga legitimasi dan kredibilitas perusahaan di hadapan pemangku kepentingan lokal sehingga akan menimbulkan kepercayaan dan persetujuan sosial atas operasi perusahaan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi *social license* hingga saat ini.

Meskipun tidak berwujud, lisensi sosial tidak berarti tidak dapat diukur atau diketahui. Boutilier dan Thomson (2011) membuat parameter perizinan sosial berdasarkan 3 (tiga) konsep yaitu: (1) Legitimasi ekonomi adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dari kegiatan operasi perusahaan kepada pemangku

kepentingan lokal. (2.a) Legitimasi sosial adalah persepsi yang diberikan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lokal bahwa perusahaan dapat menciptakan kemakmuran daerah, memenuhi harapan dan menghormati nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat. (2.b) Kepercayaan interaksional adalah ketanggapan perusahaan dalam merespon dan menjalin hubungan sosial dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat lokal. (3) kepercayaan institusional adalah persepsi pemangku kepentingan lokal terhadap agenda kepentingan antara masyarakat, pemangku kepentingan dan perusahaan perlu disamakan, sehingga menciptakan kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lokal bahwa kehadiran perusahaan di wilayah mereka digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (Swara & Simatupang, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui izin sosial masyarakat atas beroperasinya perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) melalui pelaksanaan program CSR Keramba Jaring Apung (KJA) Tanjung Limau yang dilaksanakan di Desa Tanjung Limau, Kota Bontang, Desa Kuala dan Pulau Gusung, Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan metode campuran antara penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretatif untuk mengetahui dampak pelaksanaan program CSR dan penerimaan masyarakat terhadap operasional perusahaan serta penelitian kuantitatif untuk mengetahui tingkat izin sosial yang diberikan masyarakat kepada perusahaan. Pengumpulan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 informan yang dianggap mengetahui kegiatan terkait program CSR yang dilakukan perusahaan, sedangkan pengumpulan data kuantitatif diperoleh melalui survei terhadap 30 responden dari masyarakat sekitar yang terlibat dalam kegiatan program CSR.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Dampak Keberlanjutan Program KJA Tanjung Limau

Pada pelaksanaannya, Program CSR KJA Tanjung Limau telah berhasil mengajak masyarakat khususnya para nelayan yang berada di pesisir pantai Bontang Utara untuk membentuk suatu lembaga yaitu Koperasi Etam Maritim (BEM) Bontang. Koperasi ini menjadi wadah bagi para nelayan untuk menyelenggarakan kegiatan penangkapan ikan dan budidaya ikan di bawah Program CSR yang dilaksanakan oleh PKT. Dari pelaksanaan Program CSR KJA Tanjung Limau, masyarakat sebagai penerima manfaat telah mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Dampak Program

Dampak	Deskripsi
Ekonomi	Menciptakan usaha baru seperti unit usaha budidaya ikan dan lobster dengan 124 Keramba Jaring Apung (KJA), koperasi Bontang Etam Maritim, warung makan Kerlob-Kerlob dan pabrik es Hasil Penjualan Budidaya Ikan dan Lobster Tahun 2020 Rp 511.720.000,- Hasil Penjualan Warung Kerlob-Kerlob Tahun 2020 Rp 495.000.000,-

Simpanan Pokok dan Wajib Koperasi BEM Tahun 2020 Rp 119.300.000,-
 Aset Grup Rp 2.489.090.000,-
 Peningkatan Pendapatan Masyarakat dari Rp 450.000 menjadi Rp 4.500.000 per orang per bulan

Sosial	Menambah Jumlah Anggota Kelompok menjadi 74 Nelayan Terbentuknya Kelompok Wanita dan Istri Nelayan untuk Usaha Warung Kerlob-Kerlob sebanyak 20 orang Replikasi 2 grup KJA Keterlibatan 17 pemangku kepentingan dalam Program KJA Tanjung Limau Pengurangan konflik eksternal dan demonstrasi masyarakat ke Perusahaan
Lingkungan	Perubahan perilaku penghentian penggunaan bom ikan dalam penangkapan oleh nelayan dan penghentian penggunaan pelet ikan oleh nelayan budidaya Bioindikator kualitas lingkungan perairan Kerjasama Wisata Alam dengan TNK Salebak Mangrove Penanaman 40.000 Bibit Mangrove di Lahan Pesisir 3 Hektar

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2020

B. Nilai Lisensi Sosial

Selain dampak pelaksanaan Program CSR KJA Tanjung Limau yang telah disebutkan sebelumnya, baik dari segi dampak ekonomi, dampak sosial maupun dampak lingkungan, peneliti juga melakukan evaluasi khususnya dampak sosial untuk mengetahui penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program CSR KJA Tanjung Limau. Dari hasil survey yang dilakukan peneliti terhadap 30 anggota mengenai penerimaan mereka terhadap operasional perusahaan yang dijabarkan dalam 29 pertanyaan terkait perizinan sosial dalam skala Likert (dimana 1 adalah nilai terkecil, dan 5 adalah nilai terbesar), didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Kalkulasi Indeks Lisensi Sosial

Indikator	Skor	Indikator	Skor	Indikator	Skor	Indikator	Skor
Q1.1	3,70	Q1.8	4,03	Q2.1	4,07	Q2.7	3,97
Q1.2	4,07	Q1.9	3,97	Q2.2	3,87	Q2.9	3,97
Q1.3	3,87	Q1.10	3,90	Q2.3	3,90	Q2.10	3,77
Q1.4	3,97	Q1.11	3,97	Q2.4	3,97	Q2.11	4,07
Q1.5	4,03	Q1.12	3,87	Q2.5	3,93	Q2.12	4,00
Q1.6	3,80	Q1.13	4,17	Q2.6	3,83	Q2.13	4,10
Q1.7	3,87	Q1.14	3,87	Q2.7	4,10	Q2.14	4,07
						Q2.15	4,00
Rata-Rata Skor				3,95			

(Sumber: Olahan Data Peneliti, 2020)

Merujuk pada uraian Boutilier (2017) tentang peringkat Lisensi Sosial, skornya adalah 3,95, yang berarti Persetujuan Tinggi. Tingkat ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mendapat persetujuan dari masyarakat untuk menjalankan operasi perusahaannya setelah memperoleh Batas Penerimaan dan Kredibilitas dari masyarakat. Artinya tidak ada penolakan sosial terhadap operasional perusahaan dan dapat mendukung strategi perusahaan untuk menjamin keberlangsungan perusahaan.

Kesimpulan

Program CSR Keramba Apung (KJA) Tanjung Limau telah berhasil memberikan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Di bidang ekonomi, Program KJA Tanjung Limau telah berhasil menciptakan unit usaha baru dan lapangan kerja baru di bidang perikanan dan pariwisata. Pada aspek sosial, Program KJA Tanjung Limau telah berhasil meningkatkan kohesi sosial masyarakat dan menambah jumlah anggota menjadi 84 orang serta mengurangi konflik eksternal antara perusahaan dengan masyarakat. Pada aspek lingkungan, Program KJA Tanjung Limau telah berhasil menjadi bioindikator kualitas air yang baik sehingga menjadi bukti bahwa operasional perusahaan sesuai dengan peraturan lingkungan. Selain itu, dilihat dari Indeks Lisensi Sosial, perusahaan menerima tingkat lisensi sosial 3,95 yang berarti Persetujuan Tinggi. Tingkat ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mendapat persetujuan dari masyarakat untuk menjalankan operasi perusahaannya setelah memperoleh Batas Penerimaan dan Kredibilitas dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Boutilier, R. G. (2014). Concepts and emerging ideas: frequently asked questions about the social licence to operate. *Impact Assessment and Project Appraisal* Vol. 32, No. 4, 263-272.
- Boutilier, R. (2017). *A Measure Of The Social License to Operate for Infrastructure And Extractive Projects*.
- Moffat, K., & Zhang, A. (2014). *The paths to social licence to operate: An integrative model explaining community acceptance of mining*. *Resources Policy* 39, 61-70.
- Swara, V. Y., & Simatupang, E. (2020). Keluar dari lingkaran CSR: Corporate Social Entrepreneurship dalam menjawab tantangan sosial license to operate. *Jurnal Sinergitas PkM & CSR* Vol.4, No.2, April, 201-214.
- Thomson, I., & Boutilier, R. (2011). *The social licence to operate*. In P. (. Darling, SME Mining Engineering Handbook. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration (pp. 673-390). Colorado: SME.
- Widhagdhha, M. F. (2015). Strategi Komunikasi Program CSR dan Peningkatan Kemandirian Masyarakat. *Jurnal Komunikasi Massa* Vol.1, 1-20.
- Widhagdhha, M. F., Wahyuni, H.I., & Sulhan, M. (2019). Bonding, Bridging and Linking Relationships of the CSR Target Communities of PT Pertamina Refinery Unit II Sungai Pakning. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* Jilid 35 (4), 470-483.